

WADAS MELAWAN: PERJUANGAN NILAI DI FRONTIER

Asri Widayati^{1*}

¹Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281

*Corresponding author: asri.widayati@mail.ugm.ac.id

Abstract *Studi ini merupakan bagian kecil catatan memori perjuangan nilai di dalam dan di atas permukaan bumi yang dilakukan oleh Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah dari ancaman pertambangan batuan andesit untuk kebutuhan pembangunan Bendungan Bener. Bagian kecil catatan memori ini dipandu oleh pertanyaan: "mengapa Warga Wadas memperjuangkan nilai yang ada di atas dan dalam permukaan bumi Wadas?". Perjuangan nilai penting karena mengejawantahkan makna kultur yang eksis dalam hubungan manusia dan entitas non-manusia yang berpilin. Hasil studi etnografi yang menempatkan etnografi sebagai produk sekaligus proses ini menunjukkan bahwa hubungan yang tidak terpisahkan antara entitas manusia Wadas dengan entitas non-manusia Wadas akan lenyap ketika akses pertambangan batuan andesit masuk ke Desa Wadas. Pertambangan yang hanya melihat Desa Wadas kaya akan batuan andesit tidak sebanding dengan nilai bertahun-tahun lamanya Warga Wadas merawat eksistensi berbagai entitas non-manusia termasuk tanaman pangan seperti durian, kemukus, aren, kapulaga, dan sebagainya, yang telah saling membentuk hubungan resiprokal dengan kehidupan Warga Wadas pada generasi sebelumnya, saat ini, dan selanjutnya.*

Keyword:

Desa Wadas, frontier, perjuangan nilai

Article Info

Received: 26 Apr 2023

Accepted: 18 May 2023

Published: 16 Jun 2023

1. Pendahuluan

Tulisan ini merupakan bagian kecil catatan memori perjuangan nilai di dalam dan di atas permukaan bumi yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). GEMPADEWA merupakan gerakan masyarakat di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang hingga saat ini tengah mempertahankan ruang sosial-ekologisnya dari ancaman pertambangan batuan andesit yang digunakan untuk material pembangunan Bendungan Bener. Bendungan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan tersebut terletak tidak jauh dari Desa Wadas dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong 'pembangunan ekonomi' sejak 2016 (Wardana, 2022).

Sejak tersiar kabar adanya rencana pertambangan yang desas-desusnya didengar warga sejak tahun 2013, penolakan dari beberapa warga Wadas muncul hingga beberapa tahun kemudian melahirkan GEMPADEWA (Dokumen Peneliti, 2020). Potret resistensi masyarakat

selama ini yang bertujuan untuk mempertahankan ruang sosial-ekologis di mana mereka bermukim telah banyak digambarkan melalui berbagai studi baik yang dilakukan oleh akademisi maupun peneliti. Beberapa studi yang memotret resistensi masyarakat, khususnya mengenai berbagai polemik yang ditimbulkan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) ditunjukkan oleh Kirana Mahdiah Sulaeman dan Mustabsyrotul Ummah Mustofa (2022).

Kedua penulis memperlihatkan proyek percepatan pembangunan yang digulirkan melalui PSN oleh pemerintah pusat merupakan bagian dari 'developmentalisme'. Developmentalisme memperlihatkan corak pembangunan ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Praksis pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi tersebut tujuannya adalah meraup keuntungan seluas-luasnya. Ketika hukum meraup keuntungan seluas-luasnya telah terinstitusionalisasi ke dalam negara, tidak lain hal itu merupakan manifestasi kapitalisme negara (Bosman Batubara, 2020b). Praksis yang tak pelak juga ditolak oleh masyarakat Samin ketika ruang sosial-ekologisnya terancam oleh pabrik semen (Al Amin, 2018).

Di samping itu, studi resistensi masyarakat Wadas sebenarnya telah dilakukan oleh banyak pihak termasuk studi dari Muhamad Iqbal (2022), yang mana ia lebih menyoroti perlawanan yang dilakukan oleh Wadon Wadas atau para perempuan di Desa Wadas yang turut menolak adanya pertambangan di desanya. Dengan titik berangkat yang sedikit berbeda, tulisan ini akan lebih menyoroti resistensi masyarakat Wadas melalui apa yang disebut 'perjuangan nilai'. Nilai yang dimaksud adalah nilai yang eksis dalam momen sosioalamiah (Batubara, dkk., 2020a). Suatu momen yang berlangsung dalam keberpilihan hubungan manusia Wadas dengan entitas non-manusia Wadas. Nilai dalam momen sosioalamiah inilah yang akan memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara nilai yang merawat dan nilai tidak merawat antara warga dengan pemerintah dan pengembang. Nilai yang juga merupakan wujud dari 'kultur' yang tidak berada di luar hubungan manusia dan entitas non-manusia yang berpilin. Pandangan yang kontradiktif dengan 'naturalisme' Barat yang memandang Alam dan Kultur terpisah (Descola, 2006).

Tulisan ini dimulai dengan pertanyaan "mengapa Warga Wadas memperjuangkan nilai yang ada di atas dan dalam permukaan bumi Wadas?". Perjuangan nilai menjadi penting untuk dibahas di hari ini untuk memperlihatkan gambaran yang lebih dekat dan spesifik mengenai substansi dari berbagai resistensi yang muncul dalam mode produksi dan reproduksi sosial kapitalisme yang terus saja berlangsung dan merugikan (Soriano, 2022). Yang pada praksisnya, kapitalisme tak dapat lagi dimaknai sebagai sekadar sistem sosial maupun sistem ekonomi, melainkan cara-cara mengorganisir apa yang disebut 'alam' (Moore, 2015).

Pada proses yang terus saja berlangsung dan merugikan, disiplin antropologi tentu saja memiliki posisi dalam dua hal, *pertama* disiplin keilmuannya didorong untuk dapat menjelaskan mengenai perjuangan warga yang dilihat dari kerangka bukan saja perjuangan 'kelas' seperti kebanyakan studi, namun juga perjuangan nilai yang sebenarnya merupakan manifestasi kultur yang wujudnya tidak berada di luar hubungan manusia dan entitas non-manusia yang berpilin (sosioalamiah).

Selain itu, *Kedua* mengenai tren antropologi di hari ini yang didorong untuk mencari alternatif yang mungkin terhadap pembangunan yang developmentalis menuju pembangunan yang anti-developmentalisme. Namun, pencarian alternatif itu tidaklah mudah. Sebab, pemberdayaan masyarakat yang juga tengah digandrungi utamanya dalam antropologi terapan (*applied anthropology*) menurut Widayanti (2012) sejauh ini berdiri pada dua kaki, yakni yang developmentalis dan yang anti-developmental. Perjuangan nilai Warga Wadas ini kemudian saya rasa, dapat menjadi contoh bentuk pemberdayaan masyarakat yang anti-developmentalisme.

Melihat Desa Wadas yang saat ini tengah berada pada tahap akan mulai ditambang dalam penggambarannya tak bisa dapat dilepaskan dari studi mengenai kritik terhadap kapitalisme. Developmentalisme yang merupakan manifestasi dari hukum meraup keuntungan seluas-luasnya yang terinstitusionalisasi ke dalam negara (Batubara, 2020b), tak dapat dipungkiri akan menemukan kritiknya pada kritik terhadap era *capitalocene* atau era kapital yang terus berlangsung dan merugikan ini (Moore, 2016). Sehingga untuk dapat mencoba memotret gambaran keterkaitan momen spasial dan menempatkan Desa Wadas sebagai bagian dari *frontier* di mana ekspansi kapitalisme tengah berlangsung (Bryant, 2016). Dengannya, digunakanlah konsep konsep ekologi politis urbanisasi yang telah di-ekologi-kan oleh Batubara, dkk., (2021) sebagai rujukan utama.

Bosman Batubara, dkk., (2021) memperlihatkan dalam berlangsungnya apa yang disebut sebagai “urbanisasi” tidak sekadar terletak pada sekadar momen berpindahnya orang dari desa ke kota. Atau yang disebut sebagai “kota” tidak juga dimaknai sekadar bentuk maupun administratif tertentu. Urbanisasi dilihat sebagai proses bagaimana kota-kota tercipta (Harvey, 2012; Batubara, dkk., 2021). Proses bagaimana kota-kota tercipta itu dimanifestasikan pada rupa pembangunan yang berlangsung pada tiga momen, yakni momen ketimpangan, momen rekonfigurasi spasial, dan momen sosialiamiah (Batubara, dkk., 2021).

Pada titik inilah, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan wujud dari hukum maksimalisasi keuntungan yang telah terinstitusionalisasi ke dalam negara mengemuka. Karena salah satu tujuan PSN tidak lain adalah percepatan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi dalam rupa pembangunan Bendungan Bener. Pembangunan Bendungan mensyarakatan Desa Wadas yang kemudian menjadi *frontier* dari proses ekspansi kapitalisme yang terus berlangsung itu. Desa Wadas yang ditempatkan sebagai *frontier* akan terancam kehilangan nilai-nilai hubungan manusia dengan entitas non-manusia yang saling merawat ketika pertambangan benar berlangsung.

Maka, ekologi politis urbanisasi saya rasa mampu untuk menteorisasikan praksis kapitalisme yang merugikan di Desa Wadas tersebut. Ditambah dengan penekanan pada momen ketimpangan dan momen sosioalamiah yang menjadi titik bagaimana “nilai” adalah manifestasi kultur yang tercakup dalam natur yang diperjuangkan oleh Warga Wadas (Descola 2006). Selain itu, ekologi politis merupakan konsep yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekologi manusia dari disiplin antropologi yang penting dan relevan hingga hari ini. Yang mana Andrew P. Vayda menurut Afiff (2009) dengan gagasan *progressive contextualization*-nya merupakan antropolog yang sangat berpengaruh pada perkembangan awal ekologi politis.

Dengan gagasan *progressive contextualisation*, Vayda kala itu mencoba melampaui konsep *human use*. Mengutip Castri (1976), ia menjelaskan bahwa manusia dalam memanfaatkan lingkungan tidak selalu sekadar berkatat pada ekosistemnya, melainkan juga melalui berbagai sistem ekonomi yang memungkinkan adanya pertukaran materi, energi, yang bahkan bahkan melintasi zona-zona ekologis (Vayda, 1983). Asumsi Vayda yang erat kaitannya dengan dengan kelahiran ekologi politis yang kemudian memunculkan berbagai pembacaan atas berbagai persoalan, misalkan, permasalahan banjir, erosi, dan semacamnya, tidak dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan belaka melainkan juga politis dan tidak alamiah.

Ekologi politis kemudian terus menjadi konsep yang berkembang dan digunakan oleh para antropolog. Bahkan hingga saat ini ekologi politis setidaknya telah berkembang dalam tiga generasi. Melalui ulasan buku *Global Political Ecology* karya Peet, Robbins and Watts (2010), perkembangan ekologi politis itu dapat diperoleh dari ulasan Darmanto (2013). Generasi

pertama ekologi politis, serupa dengan gambaran Afiff (2009), mula-mula dipengaruhi oleh *progressive contextualisation* yang digagas Vayda. Lalu dalam ulasan yang ditulis Darmanto (2013) pada 1970-an dan 1980-an ketika para ilmuwan sosial kembali memiliki gairah untuk mempelajari pemikiran Karl Marx, ekologi politis banyak dipengaruhi oleh pemikiran Marx. Meskipun, ekologi politis generasi kedua ini gagal menggunakan analisis Marxian dan justru terjebak pada determinisme ekonomi Marx.

Konsekuensi terjebaknya para pemikir ekologi politis pada determinisme ekonomi Marx membuat mereka gagal melihat detail dari hubungan manusia dengan lingkungan yang saling terkait. Kegagalan itu salah satu sebabnya bermuara pada pembacaan hubungan manusia-lingkungan yang dibaca pada koridor pemikiran Marx mengenai proses produksi di dalam pabrik atau kapitalisme pabrik (Batubara, 2020b). Hal itu yang membuat para pemikir ekologi politis generasi kedua harus meminjam berbagai disiplin ilmu baik dari antropologi budaya, post-strukturalis, dan disiplin ilmu sosial lainnya (Afiff, 2009).

Namun, ekologi politis dalam perkembangannya di hari ini masih menjadi kerangka konseptual yang tetap relevan. Seperti karya yang ditunjukkan oleh Koalisi Maleh Dadi Segoro (Batubara, dkk., 2021) dalam buku *Banjir Sudah Naik Seleher*. Karya tersebut selain memperlihatkan perkembangan terkini penggunaan kerangka konseptual ekologi politis, khususnya ekologi politis urbanisasi. Di sisi yang lain juga dalam proses studinya banyak menggunakan data etnografi, khususnya untuk menampilkan etnografi banjir di Semarang, Jawa Tengah. Ekologi politis hari ini di Indonesia, yang menurut Afiff (2009) gencar digunakan setelah rezim Orde Baru runtuh karena kentalnya ekologi politis dipengaruhi oleh pandangan Marx. Dan mulai diperkenalkan di Antropologi, FISIP, UI menjadi mata kuliah, telah mengalami perkembangan lebih lanjut.

Jika Arsel (2009) berpendapat bahwa ekologi politis, khususnya generasi yang kedua gagal untuk mewujudkan konsep “ekologi politis” secara seimbang. Bahwa ekologi politis masa itu justru bertujuan memenangkan masing-masing kepentingan baik ekologi maupun politis. Maka kini, pada perkembangan ekologi politis, khususnya yang ditunjukkan oleh Batubara, dkk. (2021) telah memperlihatkan perkembangan lebih lanjutnya untuk di-ekologi-kan konsepnya yang kurang selama ini kurang ekologis, dan secara bersamaan juga di-repolitisasi ketika ekologi politis justru juga mengalami depolitisasi. Perkembangan yang juga ditandai dengan menguatnya kembali dua pandangan yang menjadi fondasi ekologi politis, perspektif Marxis dan post-strukturalis.

Namun, tradisi Marxian yang digunakan bukan lagi terletak pada determinisme ekonominya melainkan pada pandangan ditangkapkan momen sosialiamiah. Suatu pandangan yang tidak memisahkan manusia dengan entitas non-manusia, atau pandangan yang kontra terhadap filsafat Barat Cartesian dan Kantian yang memisahkan Alam dan Manusia. Sedangkan, upaya repolitisasi material-empiris ekologi politis yang mengalami depolitisasi, dilakukan melalui penggunaan pandangan post-strukturalis utamanya tradisi Foucauldian untuk memperkuat argumen dan digunakan secara bersamaan. Dan secara khusus dalam tulisan ini, pandangan sosioalamiah ini yang lebih disoroti untuk menggambarkan maksud “perjuangan nilai”. Lebih lanjut, pandangan sosioalamiah ini akan dielaborasi lebih lanjut dalam material-empiris hubungan warga Wadas dengan entitas non-manusia Wadas.

Dengan merujuk pada pandangan sosioalamiah yang kemudian digunakan sebagai kekuatan ekologi politis hari ini. Mengartikan kembali digunakannya pandangan Vayda. Karena Vayda sebagai seorang pemikir ekosistem materialistik (Ahimsa-Putra, 1994), yang juga memiliki kecenderungan pada pandangan sosioalamiah tersebut. Vayda berangkat dari kritik atas hubungan manusia dengan lingkungan yang dianalisis menggunakan analisis kebudayaan

seperti yang ditunjukkan oleh Julian Steward menuju analisis ekosistem, yang menempatkan kultur sebagai aspek yang telah tercakup dalam hubungan manusia dengan spesies lain, maupun hubungan dengan entitas non-manusia di dalam jaring-jaring kehidupan (Ahimsa-putra, 1994; Afiff, 2009).

2. Metode

Studi ini merupakan hasil dari kolaborasi riset yang dilaksanakan bersama beberapa teman di Yogyakarta yang memiliki keresahan yang sama melihat berbagai krisis sosial-ekologis yang terjadi di berbagai tempat. Di mana krisis sosial-ekologis berlangsung integral dalam mode produksi dan reproduksi sosial kapitalisme. Studi ini hanya merupakan bagian kecil dari hasil pengumpulan data etnografi yang dilakukan sepanjang Januari 2021 hingga Maret 2021 di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Pengumpulan data etnografi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan interlokutor sekaligus *live-in* di rumah-rumah warga yang menolak proyek tambang batuan andesit untuk material pembangunan Bendungan Bener.

Etnografi dalam hal ini dicapai dalam dua hal, *pertama* sebagai proses, dan sekaligus *kedua* sebagai produk (Kramer and Adams 2017). Sebab, sebagian data dalam studi ini telah digunakan sebagai bahan kampanye menyuarakan penolakan warga Wadas terhadap rencana tambang batuan andesit di desanya. Kampanye khususnya dilakukan melalui berbagai *platform* media sosial “Wadas Melawan”. Selain itu, sumber data lain yang didapatkan untuk mendukung studi ini adalah data yang didapatkan dari berbagai media daring dan laporan penelitian untuk melengkapi sekaligus menunjukkan gambaran terkini kondisi Desa Wadas.

Analisis data yang dilakukan dalam studi ini dilakukan dengan memilah hasil wawancara, dokumen, dan catatan lapangan sesuai dengan tujuan penyelidikan berangkat dari pertanyaan utama “mengapa Warga Wadas memperjuangkan nilai yang ada di atas dan dalam permukaan bumi Wadas?”. Pertanyaan tersebut juga lebih menyoroti apa yang disebut perjuangan nilai dan relevansinya dengan pencarian alternatif yang mungkin untuk pemberdayaan masyarakat yang anti-developmentalisme di hari ini yang diekspresikan salah satunya oleh gerakan Wadas Melawan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ekologi Politis Urbanisasi: Pembangunan Bendungan Bener dalam Pusaran PSN

Berbagai proyek pemerintah pusat, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) sebenarnya tidak berlangsung di ruang kosong (Wardana, 2022). Namun seringkali, proyek yang dituntut rampung cepat di berbagai tempat, khususnya juga terjadi di Desa Wadas di mana tempat pertambangan batuan andesit demi kebutuhan material PSN Bendungan Bener digulirkan. Hampir selalu melalui cara-cara sembunyi-sembunyi digunakan untuk melancarkan proyek percepatan semacam itu. Seperti halnya dengan desas-desus rencana proyek Bendungan Bener yang terdengar di tahun 2013 di mana Desa Wadas akan terdampak oleh proyek. Warga Wadas kebanyakan tidak menahu mengenai kejelasan proyek tersebut (Dokumen Peneliti, 2021; Komunikasi dengan Kiai L, 2021). Hanya terlacak pada kanal berita daring berlangsung pengambilan sampel batu di Desa Wadas pada Oktober tahun 2015 (“Ambil Sampel Batu, Bukit Wadas Dibor 75 Meter : Okezone News” 2015).

Proyek yang seringkali dikerjakan dengan terburu-buru oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan ke pengembang—dalam hal pertambangan di Desa Wadas adalah BBWSO—hal tersebut juga menggambarkan keberlangsungan mode produksi dan reproduksi sosial kapitalisme di berbagai tempat dengan rupa yang hampir mirip dalam rupa infrastruktur. Dan ketika dirunut pembangunan infrastruktur tak terlepas dari pembangunan infrastruktur

sebelumnya di tempat lain. Logika kapitalistik yang mirip dengan penggambaran Batubara, dkk., (2021) mengenai urbanisasi. Yakni berlangsung melalui tiga momen berupa momen ketimpangan, momen rekonfigurasi sosiospasial, dan momen sosioalamiah.

Pengerukan dan pemaprasan bukit di Desa Guntur, Kecamatan Bener, di mana proyek Bendungan Bener sedang dilangsungkan hari ini tidak dapat dilepaskan dari memori mencekam kenyataan penggusuran dalam rupa pembangunan Kota Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Kala itu, sebanyak 637 hektar lahan yang digusur untuk pembangunan Kota Bandara YIA yang mana bermukim di atasnya 2.875 keluarga (Apriando, 2017). Para keluarga yang menunjukkan tidak kosongnya ruang yang digunakan untuk pembangunan bandara. Generasi keluarga yang merupakan wujud entitas manusia yang berpilin dengan entitas non-manusia berupa kesuburan tanah lahan-lahan Desa Palihan dan Desa Glagah, di Kecamatan Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana saat ini Bandara YIA beroperasi.

Momen hari ini yang tak dapat dari sejarah penggusuran di masa yang telah lalu itu menggambarkan realitas digesernya hubungan saling merawat antara entitas manusia Temon dengan entitas non-manusia Temon. Bumi Temon yang telah memberikan penghidupan bagi warga Temon dengan hasil pertaniannya yang melimpah, bahkan merupakan penyuplai berbagai sayur dan buah ke berbagai daerah di sekitarnya (Apriando, 2017). Dipaksa untuk dihancurkan kemudian ditata ulang untuk pembangunan Kota Bandara YIA. Pada proses penghancuran dan penataan ulang itulah, apa yang disebut momen rekonfigurasi spasial dan momen sosioalamiah berlangsung secara bersamaan. Tidak sampai di situ saja, momen-momen yang terjadi di dalam mode produksi kapitalisme itu, mensyaratkan “ketimpangan” di tempat yang lain (Smith, 2008).

Lanskap Temon yang kini telah diubah menjadi Bandara YIA pada kenyataannya memerlukan aspek lain untuk menyokong operasionalnya, salah satunya adalah “air”. Kita akan melihat momen ketimpangan yang dipersyaratkan oleh pembangunan di tempat satu, akan terasa merugikan di tempat yang lain. Mirip seperti argumen yang dijelaskan oleh (Putri, 2016) atas pembacaan “Ketimpangan Pembangunan” oleh Neil Smith (2008) kapitalisme mengukuhkan dirinya seperti sebuah jungkat-jungkit. Artinya, kapitalisme seolah-olah membangun, namun di tempat yang lain menciptakan ketimpangan.

Tak dapat dibantahkan lagi, Kota Bandara YIA yang kini kokoh berdiri itu, yang membutuhkan suplai banyak air demi operasionalnya mensyaratkan proyek Bendungan Bener sebagai penyuplai kebutuhan air (Koriun, 2022; Amin, 2022). Tidak sampai di situ saja, sifat dari kapitalisme yang menurut (Harvey, 2017) bersifat temporal (*spatio temporal fix*). Yang mana selalu membutuhkan tempat-tempat baru untuk melancarkan ekspansi dan akumulasi. Kapitalisme jika dibayangkan, maka sukar untuk dilihat di mana pemberhentiannya. Dan Desa Wadas dapat dilihat sebagai tujuan selanjutnya dari rupa kapitalistik Bendungan Bener itu. Rupa dari momen rekonfigurasi sosiospasial dan momen sosialamiah yang kembali diulang.

Bendungan Bener sebagai PSN yang dinarasikan seolah-olah adalah pembangunan, namun sebenarnya adalah pembangunan kapitalistik, mensyaratkan ketimpangan di Desa Wadas yang lanskap sekaligus kehidupan sosial di dalamnya perlahan dihancurkan secara kreatif (Brenner dan Schmid, 2015). Sebuah kenyataan yang kian menguatkan pendapat (Moore, 2014) kapitalisme yang mensyaratkan ketimpangan dan penghancuran di tempat lain (Smith, 2008; Brenner dan Schmid, 2015) adalah sistem paling boros yang ada di muka bumi. Kita dapat melihat rentetan momen-momen itu pada 27 proyek PSN di Jawa Tengah dan DIY, yang jika dilihat sekilas adalah sekadar rentetan daftar. Namun, jika dipahami lebih mendalam, maka keterhubungan proyek didasarkan pada “ketimpangan” yang dipersyaratkan oleh

pembangunan di tempat yang satu untuk kebutuhan di tempat yang lainnya.

No.	Jenis Proyek	Wilayah	Keterangan
1.	Jalan Tol Semarang – Demak	Provinsi Jawa Tengah	24,0 km
2.	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	DIY dan Provinsi Jawa Tengah	71 km
3.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo- Yogyakarta- Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan DIY	-
4.	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya- Cilacap	Jawa Barat dan Jawa Tengah	-
5.	Jalan Tol Semarang <i>Harbour</i>	Provinsi Jawa Tengah	-
6.	Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta – Kulon Progo	Provinsi DIY	-
7.	<i>Double track</i> Jawa Selatan	Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur	-
8.	Pembangunan <i>underground</i> Simpang Lima	Provinsi Jawa Tengah	-
9.	Kawasan Industri Terpadu Batang	Provinsi Jawa Tengah	-
10.	Pembangunan Rumah Susun	Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta	-
11.	Bandara Internasional di Provinsi DIY	Provinsi DIY	-
12.	Pengembangan Bandara Ahmad Yani	Provinsi Jawa Tengah	-
13.	<i>Upgrading</i> kilang-kilang eksisting (RDMP)	Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur	-
14.	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Beberapa provinsi di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa	-
15.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah	-
16.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah	-
17.	Bendungan Gondang	Provinsi Jawa Tengah	Sudah tidak masuk PSN 2020, dicantumkan hanya untuk memberi

			penegasan
18.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah	-
19.	Bendungan Logung	Provinsi Jawa Tengah	-
20.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah	3 kali perubahan tetap tercantum pada proyek strategis nasional (2016, 2017, 2018, 2020)
21.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah	Baru masuk proyek strategis nasional
22.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah	Baru masuk proyek strategis nasional
23.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah	Baru masuk PSN
24.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)	DIY	Baru masuk PSN
25.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah	-
26.	Kawasan Industri Kendal	Provinsi Jawa Tengah	-
27.	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung, dan 7 kawasan lainnya	Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku Utara, DIY, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung	-

Tabel 1. Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah dan DIY (Diolah oleh Penulis, 2022)

Tabel 1,2 menunjukkan rentetan PSN di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020. Aturan yang merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PSN merupakan regulasi yang memang sering mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tidak terkecuali pada PSN Bendungan. Menurut Aris dan Joko (2020) sejak kekuasaan Hindia Belanda sampai September 2019 telah tercatat sebanyak 231 bendungan yang terdaftar. Namun, dari 231 bendungan sebagian daripadanya masuk sebagai sPSN yang baru saja direncanakan dan PSN yang sedang dalam proses dibangun. Jumlah bendungan yang masuk dalam PSN adalah sebagai berikut:

No.	Peraturan Presiden	Jumlah	Tahun
1.	Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN	47	2020
2.	Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN	50	2018
3.	Perubahan pertama Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 selengkapnya	53	2017

Tabel 2. Rencana Pembangunan Bendungan (Diolah oleh Penulis, 2022)

Kedua tabel di atas yang saling terkait, sebenarnya memperlihatkan dua hal, *pertama* penetapan bendungan melalui Peraturan Presiden (PerPres) mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Terdapat bendungan yang baru saja masuk menjadi PSN dan terdapat bendungan akhirnya tidak lagi menjadi PSN. Kemudian *kedua*, tabel yang pertama (1), ada untuk menunjukkan bahwa dua proyek yakni Kota Banda dan Bendungan Bener adalah proyek yang masuk sebagai PSN. Dua proyek itu jika dilihat secara sekilas secara politis-teknis tampaknya 'komplementer'. Artinya seolah-olah saling melengkapi. Namun secara praksis, proyek itu pada kenyataannya berlangsung dan eksis diproduksi secara timpang.

Kota Bandara YIA yang secara kentara sebelumnya hadir dan mengubah lanskap Temon di mana di dalamnya eksis manusia dan entitas non-manusia Temon yang saling berpilin, sekali lagi ditegaskan bahwa mensyaratkan penghancuran di Desa Guntur untuk membangun Bendungan Bener. Kemudian, Bendungan Bener yang seolah-olah adalah pembangunan dalam rupa PSN nyatanya mempersyaratkan perubahan sosioalamiah Desa Wadas yang akan ditambah untuk kebutuhan material berupa batuan andesit. Dan bagaimana Warga Wadas sebenarnya memiliki tujuan agar tak terjadi perubahan sosioalamiah di desanya, secara teoritis dan material-empiris dijelaskan pada sub-bagian selanjutnya dalam wujud perjuangan nilai.

3.2. Perjuangan Nilai: Perlawanan Warga Wadas di *Frontier*

Ungkapan yang mungkin dapat menggantikan ucapan "selamat datang" atau memberi gambaran kesan pertama kali meneguhkan diri untuk meneliti dan mencatat apa yang terjadi di Wadas adalah ungkapan seorang warga tentang bagaimana suasana di awal tahun 2021 di Desa Wadas. Ungkapan itu demikian bunyinya:

"Kudune sakniki musim duren, nek musim panen niku kathah, neng dalam-dalan kathah sanget. Nanging sakniki posisine ngeten, menungsane lagi angel, ya wit-wit dados sami angele" (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

"Harusnya sekarang musim durian, 155in i sedang musim panen sangat banyak, di jalan banyak. Tapi sedang posisi seperti ini, manusianya sedang sulit, ya pohon juga merasakan hal yang sama" (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021)

Saya dan seorang teman yang bertamu di rumah beliau untuk mengobrol hanya

mengernyitkan dahi 156in ik tetap mencoba untuk menikmati sajian olahan gula aren yang dibuatnya sendiri menggunakan bahan dasar getah aren yang diambil dari lahannya. Namun, meskipun seorang warga itu masih memiliki penghasilan dari *nderes* aren ia merasakan hal yang berbeda. Ketiadaan panen durian yang biasanya melimpah tak dirasakannya. Ditambah dengan suasana yang membuat dirinya lebih gelisah dari biasanya karena rencana pertambangan batuan andesit di desanya tampak kian lebih nyata daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu pula, yang paling membuat saya lebih mengernyitkan dahi lagi ialah, bahwa kegelisahan akan adanya rencana pertambangan batuan andesit itu menurut M tak hanya dirasakan olehnya. Namun juga oleh berbagai tanaman seperti durian yang baginya turut merasakan hal serupa sehingga buah yang melimpah tak didapatkannya.

Kesan suasana kala itu membuat saya teringat lagi-lagi tentang Desa Wadas yang direncanakan akan dijadikan lokasi pertambangan batuan andesit memanglah merupakan ruang yang kosong, melainkan di sana terdapat keberpilihan antara manusia atau Warga Wadas dengan entitas non-manusia Wadas (sosioalamiah). Kehidupan warga Wadas yang mayoritas petani yakni petani *alas* (hutan) yang tidak memerlukan waktu pasti seperti pertanian padi yang harus dirawat rutin setiap hari. Kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi semacam itu telah menciptakan kehidupan yang tenteram bagi warga Wadas. Dan ketika M mengungkapkan bahwa tanaman durian juga tak ikut menghasilkan buah, ia merasa ketidaktentraman itu juga dialami oleh durian sebagai entitas non-manusia Wadas.

Pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebenarnya mulai tersiar di tahun 2013 (S. Dian Andryanto 2022). Namun, setelah tahun itu rencana pertambangan masih seperti kabar angin. Menuju tahun 2018 berbagai dinamika dan gejolak dari warga untuk tegas menolak rencana pertambangan mulai mengemuka. Terlebih, notabene Warga Wadas yang menolak bergabung dan membentuk Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) pada tahun 2018 tersebut. Sejak saat itu, latar belakang mengapa lahir GEMPADEWA yakni menolak pertambangan batuan andesit di Desa Wadas yang akan merusak bumi Wadas mulai juga menjadi perhatian Warga Wadas secara lebih luas. Dibuktikan oleh ungkapan dari percakapan kami kala itu bersama beberapa perempuan Wadas 156in ik turut serta dengan mereka membuat *bese*k (wadah dari anyaman bambu).

“Dulu tidak resah karena tidak tahu yang semestinya. Dulu tidak terlalu berpikir. Sekarang mengerti dampaknya, ya tetap menolak” Komunikasi dengan T dan S, 22 Februari, 2021.

Sejak 2018 itu pula, penolakan warga atas rencana pertambangan batuan andesit selain tersebar luas kepada warga yang akhirnya menyadari berbagai persoalan dan kerugian yang akan dialaminya. Penolakan rencana pertambangan juga menjadi perhatian 156in ik media sosial dan berbagai pihak termasuk pengembang yakni BBWSO dan juga pemerintah. Meskipun, sebagaimana M telah ungkapkan pula, peran pemerintah yang selayaknya menciptakan ketentraman pada warganya, justru yang terjadi sebaliknya. Tercermin pada ungkapannya sebagai berikut:

“Pun ayem tentrem diodal-adhol ngene ki yo wis. Lha negara niku pripun sik wis tentrem diodal-adhol, sik ora tentrem yo ngeten niki wonten sik ngrampok. Nyambut gawe tentrem diodal-adhol njuk nyambut gawe napa nek ora ngrampok” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

“Sudah aman tenteram diobrak-abrik itu ya sudahlah. *Lha* negara itu bagaimana yang sudah tenteram diobrak-abrik, yang tidak tenteram ya seperti ini ada yang merampok. Bekerja yang menentramkan diobrak-abrik lalu mau bekerja apa 157in i tidak merampok” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

Tak pelak, selain perasaan tidak tenteram yang hadir kala itu, seperti yang telah dirasakan oleh M. Gejolak yang terjadi di tahun 2021 di Desa Wadas didasarkan pada bayangan perubahan yang akan terjadi ketika pertambangan nyata masuk di Desa Wadas. Desa Wadas yang tercakup di dalamnya Warga Wadas (entitas manusia Wadas) dengan kesuburan tanah sekaligus diliputi dengan berbagai tanaman (entitas non-manusia Wadas) yang telah membentuk hubungan saling menguntungkan justru akan lenyap. Wadas akan menjadi *frontier*, yang artinya menjadi memiliki batasan (Bryant, 2016). Karena hubungan saling menguntungkan itu digeser menjadi hubungan yang lebih 157in ikan157e. Hubungan yang akan tercipta ketika pertambangan batuan andesit eksis di Desa Wadas. Sebab pengembang seperti Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSSO) hanya melihat Wadas sebagai daerah penghasil batuan andesit. Bayangan semacam itu juga tercermin pada ungkapan para perempuan Wadas berikut ini:

“Damel besek (membuat besek). Coba 157in i bambunya sudah tidak ada, coba mau gimana kita. Kalau beli, iya 157in i ada yang bisa dibeli. Kalau jadi ditambah itu sangat merugikan. Padane ra ana sik dituku njuk kepiye (Kalau tidak ada yang dibeli terus gimana). Soale kene riku niki orang-orang petani ta (Masalahnya orang sini itu orang-orang petani). Orang 157in i sudah tua-tua di sini, seperti saya, 157in i masih muda masih bisa ke Kalimantan. Kalau sudah tua seperti saya 157in ik mana. Ambil yang ada, ada durian sedikit, kapulaga, petai, kelapa itu, tempat saya di sana. Kemarin saya ke hutan ada kelapa jatuh ya dibawa pulang, digendong. Dingge nyayur (untuk masak sayur). Pokoke sangat-sangat merugikan orang tani. Di 157in ikan orang tani yang pegawai negeri itu tidak ada. Semuanya tani. Tani tanggung. Iya misalnya, tani banyak hasilnya. Kalau punya tanah sedikit mau dikeruk, bagaimana. Kita tetap menolak.” (Komunikasi dengan T dan S, 22 Februari, 2021).

Ungkapan Ibu T dan Ibu S itu membuat saya membayangkan bagaimana siklus kehidupan mereka tetap dan akan terus berlanjut karena mereka memiliki kemampuan untuk merawat hubungan dengan entitas non-manusia itu dari generasi nenek moyang mereka hingga saat ini. Yang juga telah diungkapkan oleh M berikut ini:

“Desa Wadas awit nenek moyang, anak turun saking riyen, dados penghidupan wonten mriki niku tani, ya napa masyarkate menawi boten ana londho tekan mriki niku yo jane tenang. Masyarakat sampun sejahtera yo dugi nggih isa nyekolahke anak, isa mondokke anak, kehidupan pun ayem tentrem. Niku disayangaken sanget nek wonten kayak niki. Boten dipun karepaken masyarakat Wadas niku, boten setuju” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

“Desa Wadas karena dari nenek moyang, anak turun dari pendahulu, sehingga penghidupan di sini itu adalah petani, kalau saja tidak ada *londho* (merujuk pada orang asing berkonotasi negatif seperti pengembang dan pemerintah) sampai di sini itu ya sebenarnya tenan. Masyarakat sudah sejahtera ya bisa menyekolahkan anak, bisa mengirim anak ke pondok (pesantren), kehidupan sudah aman

tenteram. Hal itu sangat disayangkan sekali kalau ada seperti ini. Tidak diinginkan masyarakat Wadas, tidak setuju (merujuk pada rencana pertambangan)” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

Namun, logika kapitalis yang berseberangan dengan kenyataan nilai yang ada di Wadas justru akan mengubah hubungan-hubungan yang merawat yang diwariskan dari nenek moyang itu. Karena *frontier* selalu dibutuhkan oleh kapitalis—pemilik kapital—demi terwujudnya ekspansi kapital. Kapitalis yang dalam hal ini sebenarnya tercermin pada praksis yang dilakukan oleh negara bersama dengan pengembang telah mengindahkan keberpimpinan antara entitas manusia Wadas dengan non-manusia (lahan, berbagai tanaman pangan, dan komoditi lainnya), yang sebelumnya hidup-tumbuh saling merawat dan dialektis yang melekat di Wadas. Dibuktikan dengan mulai dibukanya jalan untuk tambang dan alat-alat tambang (April, 2023) telah dimulai pertambangan batuan andesit, Desa Wadas menjadi memiliki “batasan”, yakni Wadas justru diterjang banjir besar (Nashr, 2023).

Itu mengapa M yang merasakan gejala rencana pertambangan yang akan mengancam berbagai kehidupan yang ada di dalam dan permukaan bumi Wadas sejak awal. Yang akan mengancam kesehariannya untuk *nderes* karet maupun *nderes* aren untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk memenuhi kebutuhan seperti biaya sekolah, membangun rumah, yang mana ia mengandalkan kemukus, petai, merica, maupun durian yang dapat dipanen setahun sekali. Bahkan sekali panen durian, ia mampu menghasilkan paling tidak 2 juta sehari. Dan durian ketika dipanen baru akan habis dalam waktu dua bulan. Senada dengan Ibu T dan Ibu S, menurut mereka adanya pertambangan sangatlah merugikan.

Bertani bagi mereka adalah mata pencaharian turun-temurun yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Bertani *alas* atau hutan telah menentukan keberlanjutan kehidupan keseharian warga Wadas. Selain menentukan keberlanjutan warga Wadas bertani juga memungkinkan dirawatnya entitas non-manusia secara bolak balik oleh Warga Wadas. Durian, misalkan, tidak akan eksis tanpa hadirnya cara-cara yang merawat dari warga Wadas. Dan Warga Wadas tidak akan dapat membangun rumah, membiayai sekolah, naik haji, tanpa eksisnya pohon durian yang diwariskan turun-temurun. Bahkan beberapa pohonnya telah besar dan tua, dan tidak diketahui siapa pertama kali yang menanamnya.

Selain diliputi berbagai gejala dan keresahan itu, adanya rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sejak awal dipenuhi dengan ketidakjelasan. Siapa yang bertanggung jawab pertama kali dalam *land deals* mengenai lahan dan rencana pertambangan seolah-olah simpang siur.

“Dari awal tidak ada kejelasan, artinya tidak ada yang mau mengaku siapa yang pertama kali itu. Lurah pun tidak mengaku. Tapi, lurah kan tidak memiliki tanah yang punya tanah kan rakyat” (Komunikasi dengan Kiai L, 21 Februari 2021).

Namun, pola yang hampir serupa dijelaskan oleh White, dkk. (2012), bahwa seringkali pemerintah—yang dalam kasus Wadas ini adalah ‘lurah’—berkontribusi pada pengambilan tanah milik warga untuk diberikan kepada orang kaya, dalam hal ini ‘pengembang’. Dan bukan saja diberikan pada orang yang ‘kaya’ sebagaimana White et al. (2012) katakan, namun adalah pemilik ‘kapital’ sebagai penyokong sejati pertumbuhan ekonomi dalam rupa PSN pembangunan Bendungan Bener. Dengan momok sejati yang hadir di Desa Wadas, yakni kapital (Sharp, 2006), perasaan aman dan tenteram seperti yang digambarkan oleh M itu pun perlahan dan dibayangkan justru terus-menerus akan lenyap.

“Tani niku warisan nenek moyang, warga niki petani, dados mempertahankan lingkungan hidup masyarakat iki, kangge nyekapi keluarga ya lahan menika. Istilahe wonten getah, aren, kemukus, durian. Ten riki niku kabeh tanaman hidup, nggih subur. Buktine ya krasan, ya tentrem, nek boten diodhal-adhol yo tentrem. Salahe pemerintah dewek wis tentrem kok diodhal-adhol” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

“Umpami kula boten gadah lahan, pengusaha niku. Nggih kula tumbas kayune, lha njuk didol ten pasar. Golek bathi. Ngoten niku kehidupan bermasyarakat ten riki. Dados sik boten gadah duren, pete niku mangkeh kulak duren, pete, dados didol ten pasar. Saling bantu ngeten, ten daerah mriki ngoten niki” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

“Tani itu warisan nenek moyang, warga sini petani, sehingga mempertahankan lingkungan hidup masyarakat, untuk mencukupi keluarga ya lahan itu. Istilahnya ada getah, aren, kemukus, durian. Di sini itu semua tanaman hidup, ya subur. Buktinya ya betah, ya tenteram, kalau tidak diobrak-abrik ya tenteram. Salahnya pemerintah sendiri sudah tenteram kok diobrak-abrik” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

“Misalnya saya tidak punya lahan, pengusaha itu. Ya saya beli kayunya, lalu dijual ke pasar. Mencari untung. Begitu kehidupan masyarakat di sini. Sehingga yang tidak memiliki durian, petai, itu nanti beli durian, petai, lalu dijual ke pasar. Saling membantu begitu, di daerah sini ya seperti itu” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

Cerita mengenai kenyataan saling bekerjasamanya warga yang memiliki lahan dan tidak memiliki lahan melalui mekanisme pasar yang sederhana dan tidak bercorak kapitalistik itu, mirip dengan penjelasan Wood (2002) mengenai ‘pasar’. Namun, pasar bukan sebagai desakan, melainkan pasar berlangsung dengan sirkulasi yang sederhana; membeli murah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, meskipun warga Wadas memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui penjualan hasil petik dan panen harian maupun juga terkadang panen tahunan. Namun, yang diandalkan oleh warga Wadas pada konteks perdagangan dan pasar adalah ‘sirkulasinya’. Bukan pada bagaimana komoditi yang diperjualbelikannya diproduksi dengan sarana produksi yang ‘murah’.

Hasil komoditi warga Wadas diperoleh dari hubungan dialektis, di mana entitas non-manusia (lahan termasuk tanaman di dalamnya) senantiasa dirawat dan memiliki kedudukan yang setara (Bookchin, 1964). Bukan sesuatu yang ditaklukan dan dominasi, melainkan dua entitas, baik manusia dan entitas non-manusia Wadas yang hubungannya dialektis dan saling mempengaruhi. Gambaran itu tercermin dalam pernyataan berikut:

“Nggeh nek durian niku setahun sekali, kemukus, pete, mrico. Hari-hariane nderes aren, nderes getah. Ten riki niku tumpang sari, nggeh wonten bambu, wonten kelapa. Dados wonten bambu saged didamel besek, disade. Menawi, menopo bambu wonten enten ngge enten pete, durian, nderes aren. Nek menawi lahan boten wonten nggih

pripun nek boten ngrampok” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

“Ya kalau durian itu setahun sekali, kemukus, petai, merica. Hariannya *nderes aren*, *nderes getah*. Di sini itu tumpang sari, ya ada bambu, ada kelapa. Lalu ada bambu dapat dibuat *bese*. Kalau pun, sedang tidak ada bambu ya ada petai, durian, *nderes aren*. Kalau lahan tidak ada ya bagaimana kalau tidak merampok” (Komunikasi dengan M, 21 Februari 2021).

Pertanyaan White et al., (2012) mengenai apakah perubahan lahan akan menentukan perubahan kehidupan sosial-ekonomi-politik warga yang bermukim di dalamnya, maka M dapat menangkap jawaban itu dengan mungkin warga yang tidak lagi memiliki lahan jalan penghidupan satu-satunya adalah merampok. Merampok dapat dibayangkan sebagai perilaku atas ketiadaan pekerjaan yang baik sebelumnya seperti “bertani”. Maka boleh jadi, pekerjaan warga setelah tak memiliki lahan adalah pekerjaan yang berkonotasi buruk.

Perubahan lahan dengan begitu sesuai dengan White et al., (2012) kemungkinan besar dapat mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi-politik. Namun tampaknya, tak sampai di situ saja. Adanya rencana dan kini pembukaan akses pertambangan ke Desa Wadas sebagaimana yang telah dikatakan M adalah wujud “obrak-abrik” hubungan manusia dan entitas non-manusia di Wadas. Fenomena semacam itu tak sekadar dilihat dalam satu spektrum perubahan lahan mempengaruhi kehidupan warga. Namun, adanya kapitalisme di Wadas telah merekonfigurasi ulang hubungan warga Wadas dengan entitas non-manusia yang ada di atas permukaan dan dalam bumi Wadas.

Seperti halnya merujuk pada penjelasan internalitas ganda (*double internality*) yang diungkap Moore (2015) yakni *human-in-nature* sekaligus *nature-in-human*, adanya pertambangan tidak pernah memikirkan hubungan dialektis warga Wadas dengan entitas non-manusia Wadas yang telah merawat bumi Wadas dari generasi ke generasi. Sehingga, terma-terma pembebasan lahan yang muncul seperti ganti rugi, ganti untung, bahkan akhir-akhir ini skema ‘konsinyasi’ (Utami, 2023). Kesemua itu hanya sekadar dilihat sebagai biaya apropriasi (Batubara, dkk., 2020). Yakni biaya pembebasan lahan pada umumnya yang sebenarnya tak dapat dibandingkan maupun dikalkulasikan dengan bagaimana generasi Wadas sekarang dan sebelumnya yang telah merawat nilai-nilai yang ada di dalam dan atas bumi Wadas.

Kita dapat melihat rupa PSN khususnya pembangunan Bendungan Bener dengan begitu sebagai proses produksi kapitalistik untuk menghasilkan air yang melimpah dan murah demi kepentingan Bandara YIA. Namun, sebenarnya akses air bendungan yang murah dan mudah itu nantinya sangatlah mahal karena bahan dasar bendungan berupa batuan andesit mengorbankan nilai-nilai yang dibeli murah dan/atau tak pernah dibayarkan oleh pengembang dari entitas manusia dan non-manusia Wadas yang memproduksinya lintas generasi (Moore, 2018). Pengembang dan negara yang saling menyokong dengan dimulainya pembukaan akses pertambangan, sebenarnya jika dipikirkan kembali, maka tak memberikan kontribusi apapun karena perolehan batuan andesit berbiaya murah dan bahkan tak dibayarkan. Mengapa tak dibayarkan sekalipun terdapat ganti untung, ganti rugi, maupun cara yang tak adil seperti ‘konsinyasi’ yang kini tersiar. Sebab, hampir tak ada kalkulasi yang mampu untuk menghitung nilai-nilai merawat dari generasi manusia Wadas dan entitas non-manusia Wadas semacam itu yang dapat menggantikannya. Kenyataan yang mendasari perjuangan warga Wadas sebagai perjuangan nilai di *frontier*.

“Mayoritas ya bikin *besek* itu. Pribadi. *Mangkeh nek niki wonten sik numbasi, pengepul* (nanti ada yang membeli, pengepul). *Niki sampingan ngoten niku* (Ini sampingan seperti itu). *Kadang pengin neng ngalas methik apa* (kadang ingin ke hutan memetik apa yang ada). Jenuh di rumah ya ke hutan. Enak kalau di hutan, pemandangannya segar. Di rumah jenuh, di *alas* di hutan, enak” (Komunikasi dengan S, 22 Februari, 2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang kiai atau pemuka agama Islam yang selama ini menyatakan menolak rencana pertambangan andesit.

“Dari awal memang menolak adanya tambang. Karena tanah turun-temurun untuk anak cucu” ...”*Sakjan-jane wis randue daya, tapi mentalnya ada di dalam hati. Li l’lai Kalimatillah. Tinimbang kalah, mending mati. Berjuang rapopo lah. Bumi itu kan ciptaan Tuhan. Wong kang ngrusak buminya Gusti Allah, saya yang membela. Ngonu. Nek tanduran, kan tandurane uwong. Nek bumi kui lho, kan ciptaan Tuhan itu. Makanya, Li l’lai Kalimatillah*” (Komunikasi dengan Kiai L, 21 Februari 2021).

“Dari awal memang menolak adanya tambang. Karena tanah turun-temurun untuk anak cucu” ...” sebenarnya sudah tidak punya daya, tapi mentalnya ada di dalam hati. *Li l’lai Kalimatillah* (menegakkan nama Allah). Daripada kalah, lebih baik mati. Berjuang tidak apa-apa. Bumi itu kan ciptaan Tuhan. Orang yang merusak buminya Gusti Allah, saya yang membela. Begitu. Kalau tanaman, kan tanaman manusia. Kalau bumi itu *lho*, kan ciptaan Tuhan itu. Makanya, *Li l’lai Kalimatillah* (menegakkan nama Allah)” (Komunikasi dengan Kiai L, 21 Februari 2021).

Keberpilihan manusia dan entitas non-manusia yang saling merawat kontradiktif dengan kenyataan pengembang yang hanya melihat Wadas sebagai tempat di mana batuan andesit untuk material bendungan Bener dihasilkan. Pembacaan atas keberpilihan warga Wadas dengan entitas non-manusia Wadas itu hanya dapat dibaca ketika beranjak melihat Alam dan Manusia secara tidak terpisah. Pandangan sosioalamiah berlawanan dengan semangat kapitalis yang menggunakan dualisme Alam dan Manusia, yang menurut Moore (2014; 2015) tercakup dalam *Green Thought, Green Arithmetic*, dan bercokol pada pandangan Kantian serta Cartesian Marxist yang melihat Alam dengan A besar sebagai ruang yang eksternal, untuk ditaklukan dan didominasi. Pada titik ini, Wadas sebagai ruang ekspansi kapitalisme mengemuka, ditunjukkan dengan pengadaan material bendungan berupa batuan andesit direncanakan dikeruk di bumi Wadas.

Dengan semangat pengembang dan pemerintah untuk melakukan penambangan batuan semacam itu, Wadas menjadi memiliki batasan atau *frontier*. Apa yang kemudian diperjuangkan warga Wadas untuk menolak adanya rencana pertambangan dengan begitu adalah perjuangan atas nilai yang merawat di atas dan dalam permukaan bumi Wadas. Mengartikan, adanya pertambangan dengan melalui mekanisme penggantian lahan warga melalui kompensasi, atau mekanisme lainnya tetap tidak sebanding dengan bagaimana eksisnya nilai merawat dari Warga Wadas, dari generasi sebelumnya, hingga generasi selanjutnya. Perjuangan tersebut bukan dalam koridor perjuangan kelas seperti mungkin yang dipahami secara umum, melainkan suatu perjuangan nilai.

Sebab, material-empiris di Wadas tidak dibaca dalam kerangka proses produksi di dalam

pabrik. Namun, dilihat dari bagaimana kapitalis yang direpresentasikan oleh negara dan pengembang, mencoba mengeruk dan mengambil batuan andesit sebagai sarana produksi atau material yang murah dari Desa Wadas. Disebut sebagai murah karena merujuk Moore (2015) mengenai apropriasi, apa yang disebut “nilai” yang diambil oleh kapitalis bukan saja elemen waktu kerja lebih buruh atau nilai lebih. Akan tetapi juga, kerja yang tidak dibayarkan dari dalam bumi Wadas berupa batuan andesit di mana hanya akan didapatkan ketika menggeser keberpimpinan warga Wadas dan entitas non-manusia Wadas menjadi operasi pertambangan. Suatu proses apropriasi yang tidak murah. Sehingga mengemuka perjuangan nilai yang merawat yang diekspresikan dalam banyak hal yakni demonstrasi di depan kantor BBWSO, perjuangan jalur litigasi, *mujahadah*, dan sebagainya.

Perjuangan nilai semacam itu juga menunjukkan perjuangan atas “kultur” yang tercakup dalam keberpimpinan warga Wadas dengan entitas non-manusia Wadas. Seperti bagaimana dirawatnya durian akan menunjang lancarnya ibadah haji, yang mana biaya haji ke Mekkah biasanya berasal dari pendapatan panen durian yang melimpah. Dan yang tak kalah penting adalah perbedaan nilai yang merawat dan tidak merawat.

Keberpimpinan warga Wadas dengan berbagai entitas non-manusia di Wadas menghasilkan kultur nilai keseharian yang merawat. Karena hubungan dialektis, secara bolak-balik menciptakan keuntungan yang setara. Di mana Warga Wadas merawat pohon durian, aren, kemukus, merica, dan sebagainya, dan tanah yang digunakan untuk menanam tetap terawat, dan mata air tetap terjaga, serta berbagai entitas tersebut dapat eksis di dalam dan permukaan bumi Wadas. Kenyataan yang berbeda akan muncul ketika Wadas hanya dilihat sebagai lahan yang diambil sumber daya batuan andesitnya dengan cara dikeruk, dibor, dan juga diledakan menggunakan dinamit (lihat *Democracy News* 2022).

3.3. Refleksi Perjuangan Nilai Warga Wadas

Telah menjadi tren dalam antropologi hari ini berkenaan dengan antropologi terapan (*applied anthropology*). Wujud bagaimana antropologi dalam perkembangannya tidak saja diharapkan dapat berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, namun di sisi yang lain terdapat harapan antropologi sebagai ilmu dapat menjadi tonggak pijakan untuk perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun, untuk memenuhi harapan itu rasa-rasanya tidaklah mudah. Karena tanpa berbekal ilmu yang memadai, niat baik tidak akan pernah cukup dan justru menjebak seseorang menuju pragmatisme (Welker, Partridge, dan Hardin, 2011). Niat baik semacam itu kadang kala bercokol pula pada antropologi yang tengah digandrungi hari ini yakni dalam antropologi pemberdayaan.

Antropologi pemberdayaan pada saat ini telah didorong untuk menjadi arus utama sebagai praksis dari niat dan harapan baik antropologi. Hal itu tak dapat dilepaskan dari istilah “pemberdayaan” yang dapat diakui memanglah politis. Namun, yang perlu dikritisi dari terma tersebut adalah perkembangannya di hari ini yang telah dikooptasi oleh kepentingan kapital. Seperti yang ditunjukkan pada program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan (Welker, Partridge, dan Hardin, 2011). Atau sebenarnya, praksis pemberdayaan yang bergulir hingga saat ini justru terjebak pula pada sekadar pengembangan kapasitas, pemberian bantuan langsung, ataupun ketika yang disebut “pemberi manfaat” telah merasa melakukan pemberdayaan masyarakat, maka hasilnya “penerima manfaat” dipaksa untuk menyesuaikan “struktur” yang sudah ada dan mapan.

Tidak hanya program yang diklaim sebagai “program pemberdayaan” yang dinaungi oleh CSR perusahaan menerapkan praksis semacam itu. Namun, kita dapat melihat dalam perkembangan kasus di Desa Wadas, ketika warga Desa Wadas sejak awal menolak adanya

pertambangan. Kini, dengan berbagai dinamika yang masih berlangsung, terdapat elemen yang kemudian mengenalkan pelatihan keterampilan, memamerkan berbagai produk olahan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menghasilkan produk seperti snack, makanan, dan keripik kelapa aneka rasa (Apriliano, 2022), dan parcel Wadas Manis.

Padahal jika belajar dari Ibu T dan Ibu S, ketika bambu tak ada lagi karena pertambangan beroperasi, bagaimana akan membuat *besek* (wadah olahan bambu) untuk dijual. Bagaimana produk-produk dari kelapa, produk manis yang bahan dasar maupun tambahannya berasal dari aren akan tetap eksis jika tanaman sebagai sumber bahan produksi pangan itu lenyap di Desa Wadas karena pertambangan. Belajar dari program-program yang familiar yang sering disebut sebagai “program pengembangan kapasitas” alias program yang sebenarnya memaksa, biasanya kelompok tertentu, untuk menyesuaikan dengan struktur. Misalkan suatu kelompok dipaksa untuk sesuai dengan struktur ekonomi perdagangan melalui skema KUBE dan meninggalkan struktur ekonomi sebelumnya, yakni pertanian.

Berangkat dari kasus semacam itu, konsep “pemberdayaan” saya rasa, harus beranjak untuk direfleksikan kembali. Konsep pemberdayaan masyarakat pada mulanya lahir sebagai alternatif kurang lebih dua setengah dekade silam bersamaan dengan kritik atas developmentalisme atau kapitalisme negara *a la* Orde Baru yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Semangat dari pemberdayaan masyarakat bertumpu pada keinginan menciptakan *civil society* yang besar dan kuat. Sebab sepanjang kekuasaan Orde Baru, masyarakat dijerumuskan ke hierarki terbawah melalui berbagai rupa pembangunan yang bersifat *top down*.

Akan tetapi, semangat pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan developmentalisme, pada kenyataannya, pasca tumbangannya pemerintahan despotik Orde Baru, dalam perkembangannya justru turut tercakup ke dalam mode produksi kapitalisme. Diekspresikan melalui pemberdayaan masyarakat yang selayaknya anti-developmentalisme dan anti kapitalisme, namun justru negara memberikan mandat pada perusahaan untuk melakukan TJSL melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 (Daniri, 2018). Sebuah jalan pencerah yang tidak menyelesaikan apapun kecuali tetap berada dalam mode produksi kapitalisme dan demi laju ekspansi kapital.

Melalui TJSL, mimpi-mimpi masyarakat berdaya yang dibayangkan negara dan korporasi, yakni terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memilih dalam mengatasi berbagai persoalan, dalam praktiknya tidak pernah keluar dari persoalannya (Labonte, 1989). Sebab TJSL sebagai mandat dari negara, yang dilaksanakan oleh korporasi melalui setidaknya dua tanggung jawab, yakni tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tanggung jawab lingkungan, tidak sebanding dengan luas maupun ukuran perusahaan yang beroperasi. Termasuk proporsi, lokasinya di suatu kawasan, kepadatan operasi, serta bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat sekitar maupun dengan aspek non-manusia seperti dengan air, jalan air, kebutuhan bahan mentah, dan peran mereka dalam pembagian kerja buruh (Bookchin, 1964).

Pemberdayaan masyarakat yang diarusutamakan melalui romantisasi Ottawa Charter. Justru konsekuensi dari konferensi itu memberikan makna masyarakat hanya sekadar afinitas dan geografis, padahal realitas yang dinamakan “masyarakat” lebih daripada itu (Labonte, 1989). Sehingga tak jarang kita temu praktik CSR perusahaan menempatkan “masyarakat” pada pengertian yang bersesuaian dengan Ottawa *Charter*. Apa yang disebut masyarakat paralel dengan kelompok-kelompok kecil tertentu seperti kelompok rentan, kelompok difabel, kelompok usaha bersama, kelompok nelayan, dan semacamnya.

Mimpi pemberdayaan yang ingin mewujudkan pemberdayaan yang anti-developmental, is,

menggaet masyarakat sipil yang kuat kian sulit dibayangkan. Pasalnya, para akademisi maupun Ornop yang memiliki potensi mencari jalan melalui gerakan reformis dengan memanfaatkan momentum kritik 1980-an, ditambah dengan momentum reformasi, pada kenyataannya “tidak pernah mampu memulihkan kohesi ideologis atau organisasi atau membangun basis sosial yang cukup besar” (Hadiz dan Robison, 2014:44). Para akademisi terjebak pada penelitian dan praksis korporat melalui skema pemberdayaan *a la* CSR beserta segala penilaiannya untuk mendorong korporat mendapatkan citra perusahaan yang baik. Harapan yang diromantisir pula pada uraian (Welker, Partridge, dan Hardin, 2011) bahwa antropolog, misalkan, dapat berkontribusi dan mengubah dari dalam.

Padahal konsekuensi dari praksis semacam itu tak dapat terelakkan lagi. Karena menciptakan sebagian Ornop maupun akademisi yang hanya memiliki kecenderungan untuk mengkritik, misalkan, dampak dari lingkungan saja (Widjaja, 2011). Dan kurang melihat produksi ‘kerusakan lingkungan’ yang sebetulnya juga merupakan ‘prasyarat’ yang integral dalam mode produksi kapitalisme (Batubara, 2020b). Bagaimana mandat TJSI akan berjalan, misalkan, tanpa inovasi untuk berbagai eksternalitas yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri.

Sehingga dijelaskan oleh (Hadiz dan Robison, 2014) ornop dan akademisi semacam itulah yang merupakan elemen yang telah terkooptasi secara korporatis. Apa yang kemudian mampu mereka bayangkan sebagai perlawanan atas sentralisasi dan realitas stratifikasi sekadar utopia belaka. Dengan begitu, perlawanan yang lebih struktural dan sistematis menjadi sulit dibayangkan dan tidak realistis. Akibatnya, berbagai penyelesaian atas persoalan struktural justru diatasi melalui “niat baik” dan jurus apa yang orang-orang lakukan, dan bukan tentang mengapa mereka (Bookchin, 1964).

Persis seperti ketika pembacaan atas PSN yang pada praksisnya membuat pengambilan kawasan untuk dibebaskan demi lancarnya pertambangan di Desa Wadas lebih mudah. Dan hal itu memicu naiknya eskalasi konflik di Wadas yang bergulir sejak 2018 (Wardana, 2022). Cara-cara yang kemudian hadir untuk mengurai polemik tersebut bukannya menghentikan pertambangan sesuai dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan notabene warga. Namun, pemerintah bersama dengan pengembang justru menghadirkan berbagai pelatihan keterampilan dan pembentukan KUBE. Upaya itu pun dilakukan setelah sebagian warga, dalam dinamikanya, justru menyatakan pro-bersyarat dengan iming-iming adanya sarana pendidikan yang akan diperbaiki dan pembentukan koperasi (Muryanto, 2022; Sucahyo, 2022).

Cara-cara yang mirip seperti praksis pemberdayaan masyarakat bercorak developmentalis yang dimandatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai TJSI. Melalui mandat regulasi tersebut “masyarakat” yang istilahnya diberdayakan oleh berbagai perusahaan dibentuk ke dalam kelompok baru seperti kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat rentan, kelompok UMKM, kelompok koperasi, dan semacamnya. Persis seperti “masyarakat” yang dibayangkan pula ketika merujuk pada Ottawa Charter. Corak pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan, misalkan, pengembangan kapasitas. Memaksa masyarakat untuk bersesuaian dengan struktur yang dikehendaki oleh pemberi dana.

Cara-cara yang mirip seperti itu, jika kembali berkaca pada kasus di Wadas, maka persoalan perampasan melalui apropriasi (Moore, 2015) yang dimanifestasikan pada cara-cara menggeser kawasan Wadas yang di dalamnya eksis entitas manusia yang memiliki keberpilihan dengan entitas non-manusia Wadas seperti misalkan dengan entitas durian yang telah memberikan penghidupan bagi warga Wadas lintas generasi. Ditunjukkan pada pemanfaatan hasil panen durian setiap tahunnya yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah, membiayai sekolah anak-anak, bahkan untuk biaya beribadah naik haji (Nuswantoro, 2019).

Dengan begitu, kenyataan persoalan perampasan yang disiasati dengan pembentukan KUBE justru hanya mencerminkan tipuan. Atau sebuah kenyataan yang menurut (Moore, 2017), ia menyebutnya sebagai *singular metabolism*. Pada titik itulah menurutnya, negara maupun pengembang memiliki kapasitas terbatas dalam mengontrol dan mendominasi yang disebut sebagai alam (Moore, 2017). Polemik yang hampir serupa, yang tak dapat dilepaskan dari berbagai model “proyek percepatan pembangunan” yang mengedepankan terlaksananya proyek dengan membebaskan berbagai kawasan yang sebenarnya bukan ruang yang kosong.

Pada titik itu pula, model-model pengembangan kapasitas, seperti dengan membentuk KUBE yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud bukannya membebaskan masyarakat dari praksis developmentalisme. Sebaliknya, menjerumuskan lagi pada cara-cara yang developmentalis. Pemberdayaan memang seolah-olah menjadi istilah agung yang digunakan sebagai perjuangan untuk mengkritik developmentalisme atau pembangunanisme Orde Baru. Atau di kalangan antropolog bertujuan untuk bergerak dari antropologi pembangunan ke antropologi pemberdayaan.

Namun, berefleksi pada kasus Wadas, apakah “pemberdayaan masyarakat” wujudnya adalah pelatihan keterampilan yang sekadar mendorong warga untuk menyesuaikan pada struktur. Seperti kelompok kecil KUBE yang dibentuk bersama dengan pendamping, namun rentan bubar. Atau sebenarnya, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) yang terang-terangan menolak rencana akses masuknya tambang di Desa Wadas yang lahir dari Warga Wadas yang justru merupakan “pemberdayaan” yang anti-developmentalisme. Pembelajaran dan pendidikan yang berangkat dari bawah dan paling diharapkan oleh konsep “pemberdayaan” yang kini tengah tren. Suatu gerakan yang memperjuangkan masalah bersama. Memperjuangkan nilai keberpilihan entitas manusia dan entitas non-manusia di Desa Wadas yang saling menguntungkan dan setara.

4. Kesimpulan

Hubungan tidak terpisahkan yang juga menandai hubungan saling merawat antara entitas manusia dengan entitas non-manusia yang dimanifestasikan dalam keberpilihan Warga Wadas dengan berbagai tanaman seperti durian, kemukus, petai, aren, karet, air, dan *alas*, serta berbagai entitas non-manusia lainnya. Dua entitas yang tampaknya terpisah namun berada di satu kawasan yakni Desa Wadas itu akan lenyap keberpilihannya ketika pertambangan batuan andesit benar berlangsung di Wadas. Pertambangan yang hanya melihat Desa Wadas kaya akan batuan andesit tidak sebanding dengan bertahun-tahun lamanya Warga Wadas merawat eksistensi durian. Sekaligus durian secara resiprokal juga memberikan kebermanfaatannya bagi keberlangsungan kehidupan Warga Wadas di kehidupan sebelumnya, saat ini, dan akan datang.

Proses menuju rekonfigurasi ulang hubungan entitas manusia Wadas dan entitas non-manusia Wadas dalam rupa pertambangan di Wadas menunjukkan kenyataan bahwa dalam menyediakan sarana produksi berupa material (batuan andesit) untuk bendungan kapitalis senantiasa membayar murah bahkan tidak membayar dalam pengambilan material tersebut. Sebab kapitalis tidak mengeluarkan sepeser pun untuk mengganti proses-proses bagaimana dua entitas, baik manusia dan non-manusia yang telah merawat nilai di atas dan permukaan bumi Wadas. Proses panjang merawat apa yang ada di dalam dan di atas permukaan bumi bahkan hampir tidak dapat dikalkulasikan, misalkan, dengan pertukaran melalui uang. Proses pengambilan sarana produksi yang murah bahkan tak dibayarkan (*unpaid*) itulah yang disebut sebagai apropriasi.

Apropriasi adalah wujud dari kapitalisme yang tidak beroperasi pada sekadar proses

produksi di dalam pabrik (kapitalisme pabrik). Melainkan kapitalisme yang berlangsung untuk menyokong proses produksi dalam rupa pengambilan sarana produksi (kapital konstan) yang murah dan/atau tak dibayarkan. Apropriasi dengan begitu juga bukan merupakan proses penghisapan waktu kerja lebih buruh (eksploitasi). Namun, proses itu adalah wujud penghisapan nilai yang tak dibayarkan (*unpaid*). Yang mana sumber nilai yang tak dibayarkan itu berasal dari entitas buruh sekaligus non-buruh. Pada kasus Wadas wujud bagaimana entitas manusia Wadas dan entitas non-manusia Wadas secara resiprokal memproduksi nilai yang dipertahankan di dalam dan atas bumi Wadas dari generasi ke generasi yang tak murah dan hampir tak mungkin untuk dikalkulasikan.

Pada proses mempertahankan produksi nilai yang merawat dan nilai yang tak dapat dikalkulasikan maupun dipertukarkan khususnya dengan uang itulah wujud perjuangan Warga Wadas mengemuka. Perjuangan Warga Wadas dengan begitu pula artinya, bukanlah sekadar sebuah perjuangan kelas, namun tepatnya adalah perjuangan nilai. Nilai yang dimaksud ialah nilai “keberpimpinan” hubungan antara entitas manusia Wadas dengan entitas non-manusia Wadas. Dalam hubungan yang berpilin itu pula lah nilai menandakan “kultur” yang eksis dan berlangsung di dalam keberpimpinan dua entitas yang tidak terpisah.

Wujud perjuangan nilai itu dapat dibayangkan ketika analisis telah sampai pada kritik atas struktur, atau menyadari bahwa proses semacam itu berlangsung dalam mode produksi dan mode reproduksi kapitalisme yang masif terjadi. Yang mana memungkinkan cara-cara pembangunan, khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur bendungan, atau lebih luas lagi PSN sebagai wujud developmentalisme atau kapitalisme negara berkait kelindan di dalamnya. Dengan demikian, perjuangan anti-developmentalisme, pemberdayaan yang berdiri di atas kaki anti-developmentalisme menjadi mungkin berlangsung dalam koridor perjuangan nilai yang merawat dalam hubungan manusia dengan entitas non-manusia yang tidak terpisah, melainkan berpilin.

Referensi

- Afiff, Suraya. 2009. “Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar.” *Tanah Air*, 18–33.
- Ahimsa Putra, Hedy Shri. 1994. “Antropologi Ekologi: Beberapa Teori Dan Perkembangannya.” *Masyarakat Indonesia. LIPI Jakarta Tahun XX*, no. 4.
- Okezone. 2015. Okezone. October 13, 2015. <https://news.okezone.com/read/2015/10/13/512/1230960/ambil-sampel-batu-bukit-wadas-dibor-75-meter>.
- Amin, Asma Al. 2018. “A Resistance for Protecting Indigenous Rights: The Case Study of the Samin Community in Sukolilo Village, Pati, Indonesia.” *Journal of Human Rights and Peace Studies* 4 (2): 223–54.
- Aris, Rinaldi; Joko, Mulyono. 2020. “Penghapusan Fungsi Bendungan Pertama Di Indonesia: Studi Kasus Bendungan Nakan.” *Jurnal Infrastruktur*.
- Arsel, Murat. 2009. “Ekologi Politik Dimana Ekonominya.” *Jurnal Tanah Air* 12 (13): 16–26.
- Bambang Muryanto. 2022. “Gempadewa: Jangan Dipaksa, Kami Tetap Menolak Tambang Andesit Di Wadas - Serat.ID | Bertutur Dengan Data.” July 6, 2022. <https://serat.id/2022/07/06/gempadewa-jangan-dipaksa-kami-tetap-menolak-tambang-andesit-di-wadas/>.
- Batubara, Bosman; dkk. 2021. *Banjir Sudah Naik Seleher: Ekologi Politis Urbanisasi Das-Das Di Semarang*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Batubara, Bosman. 2020a. *Maleh Dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak*. Yogyakarta: Lintas Nalar.

- . 2020b. "Teman Rebahan: Kapitalisme Dan Covid-19." Yogyakarta: Gading.
- Bayu Apriliano. 2022. "Unik, Pria Asal Desa Wadas Ini Olah Buah Kelapa Jadi Keripik Halaman All - Kompas.Com." December 31, 2022. <https://umkm.kompas.com/read/2022/12/31/140000483/unik-pria-asal-desa-wadas-ini-olah-buah-kelapa-jadi-keripik?page=all>.
- Bookchin, Murray. 1964. "Ecology and Revolutionary Thought." *New Directions in Libertarian Thought*, 55–82.
- Brenner, Neil, and Christian Schmid. 2015. "Towards a New Epistemology of the Urban?" *City* 19 (2–3): 151–82.
- Bryant, Gareth. 2016. "10 Talking Points from Jason W. Moore's 'Capitalism in the Web of Life.'" *Progress of Political Economy*, University of Sydney. 2016. <https://www.ppesydney.net/10-talking-points-jason-w-moores-capitalism-web-life/>.
- Carles Soriano. 2022. "Anthropocene, Capitalocene, and Other '-Cenes': Why a Correct Understanding of Marx's Theory of Value Is Necessary to Leave the Planetary Crisis." November 2022. https://monthlyreview.org/2022/11/01/anthropocene-capitalocene-and-other-cenes-why-a-correct-understanding-of-marxs-theory-of-value-is-necessary-to-leave-the-planetary-crisis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=anthropocene-capitalocene-and-other-.
- Daniri, Mas Achmad. 2018. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6 (2): 1–12.
- Darmanto. 2013. "Rehal: Krisis Lingkungan, Kapitalisme, Dan Tantangan Ekologi Politik." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 30: 165–82.
- Democracy News. 2022. "Bencana Besar Bisa Muncul Di Desa Wadas Akibat Penambangan Batu Andesit." Democracy News. 2022. <https://www.democracy.id/2022/02/Bencana-Besar-Bisa-Muncul-di-Desa-Wadas-Akibat-Penambangan-Batu-Andesit.html>.
- Descola, Philippe. 2006. "Beyond Nature and Culture." In *Proceedings-British Academy*, 139:137. Citeseer.
- Hadiz, Vedi, and Richard Robison. 2014. "Ekonomi Politik Oligarki Dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan Di Indonesia." *Prisma* 33 (1): 35–56.
- Harvey, David. 2012. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. Verso books.
- . 2017. "The 'new' imperialism: Accumulation by Dispossession." In *Karl Marx*, 213–37. Routledge.
- Hary B. Koriun. 2022. "Menurut Walhi, Bendungan Bener Untuk Suplai Air Bandara YIA." 2022. <https://riaupos.jawapos.com/nasional/12/02/2022/267549/menurut-walhi-bendungan-bener-untuk-suplai-air-bandara-yia.html>.
- Iqbal, Muhamad. 2022. "Perempuan Dalam Konflik Agraria: Politik Perlawanan GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) Dalam Menolak Di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Irfan Amin. 2022. "Pembangunan Bendungan Bener Diduga Untuk Suplai Air Ke Bandara YIA." 2022. <https://tirto.id/pembangunan-bendungan-bener-diduga-untuk-suplai-air-ke-bandara-yia-goW8>.
- Jamal Abdun Nashr. 2023. "Desa Wadas Banjir, Air Mengalir Dari Pembukaan Akses Ke Lokasi Rencana Tambang - Nasional Tempo.Co." Tempo.Co. March 25, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1706962/desa-wadas-banjir-air-mengalir-dari-pembukaan-akses-ke-lokasi-rencana-tambang>.
- Kristi Dwi Utami. 2023. "Isu Konsinyasi Beredar, Sebagian Warga Wadas Resah - Kompas.Id."

- Kompas.Id. April 5, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/04/isu-konsinyasi-beredar-sebagian-warga-wadas-resah>.
- Labonte, Ronald. 1989. "Community Empowerment: The Need for Political Analysis." *Canadian Journal of Public Health* 80 (2): 87–88.
- Moore, J. 2014. "Wasting Away: Value, Waste, and Appropriation in the Capitalist World-Ecology." *World-Ecological Imaginations: Power and Production in the Web of Life* 1.
- Moore, Jason. 2015. *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. Verso Books.
- Moore, Jason W. 2016. *Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History, and the Crisis of Capitalism*. Pm Press.
- . 2017. "Metabolic Rift or Metabolic Shift? Dialectics, Nature, and the World-Historical Method." *Theory and Society* 46 (4): 285–318.
- . 2018. "The Capitalocene Part II: Accumulation by Appropriation and the Centrality of Unpaid Work/Energy." *The Journal of Peasant Studies* 45 (2): 237–79.
- Nurhadi Sucahyo. 2022. "Warga Wadas Tak Lagi Melawan Dengan Keras." July 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/warga-wadas-tak-lagi-melawan-dengan-keras/6655286.html>.
- Nuswantoro. 2019. "Limpahan Panen Bumi Warga Wadas Di Tengah Ancaman Penambangan - Mongabay.Co.Id : Mongabay.Co.Id." *Mongabay.Co.Id*. March 14, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/03/14/limpahan-panen-bumi-warga-wadas-di-tengah-ancaman-penambangan/>.
- Perdana Putri. 2016. "Penjarahan Ruang Dalam Kapitalisme ." *Indoprogress*. 2016. <https://indoprogress.com/2016/09/penjarahan-ruang-dalam-kapitalisme/>.
- S. Dian Andryanto. 2022. "Kronologis Perlawanan Warga Wadas Tak Berhenti Sejak 2013." *Tempo*. 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1559027/kronologis-perlawanan-warga-wadas-tak-berhenti-sejak-2013>.
- Sharp, Lesley A. 2006. *Strange Harvest: Organ Transplants, Denatured Bodies, and the Transformed Self*. Univ of California Press.
- Smith, Neil. 2008. "Uneven Development." *Nature, Capital, and the Production of Space*.
- Sulaeman, Kirana Mahdiah, and Mustabsyrotul Ummah Mustofa. 2022. "Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi Dalam Film Dokumenter 'Wadas Waras'(2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough." *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6 (2).
- Tommy Apriando. 2017. "Kala Warga Terus Bertahan, Tak Rela Lahan Jadi Bandara Baru Yogyakarta (Bagian 2)." *Mongabay*. 2017. <https://www.mongabay.co.id/2017/12/15/kala-warga-terus-bertahan-tak-rela-lahan-jadi-bandara-baru-yogyakarta-bagian-2/>.
- Vayda, Andrew P. 1983. "Progressive Contextualization: Methods for Research in Human Ecology." *Human Ecology* 11 (3): 265–81.
- Wardana, Agung. 2022. "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo, Jawa Tengah." *Undang: Jurnal Hukum* 5 (1): 1–41.
- Welker, Marina, Damani J Partridge, and Rebecca Hardin. 2011. "Corporate Lives: New Perspectives on the Social Life of the Corporate Form: An Introduction to Supplement 3." *Current Anthropology* 52 (S3): S3–16.
- White, Ben, Saturnino M Borrás Jr, Ruth Hall, Ian Scoones, and Wendy Wolford. 2012. "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *The Journal of Peasant Studies* 39 (3–4): 619–47.

- Widjaja, Andree Emmanuel. 2011. "Corporate Social Responsibility (CSR) and Its Current Practices in Indonesia." In *Conference: Proceeding of 21st Annual Meeting of International Conference on the Pacific Rim Management at: Tainan, Taiwan Retrieved from: https://www.uschamber.com/sites/default/files/documents/files/apec_program_strengthening_indonesias_competitiveness*.
- Wood, Ellen Meiksins. 2002. *The Origin of Capitalism: A Longer View*. Verso.